

Dinamika Moderasi Beragama di Rembang Jawa Tengah: Interaksi Nahdlatul Ulama dan LDII dalam Perspektif AGIL

Abdul Wadud Kasful Humam¹, Nur Huda², Ahmad Musonnif Alfi³

¹STAI Al-Anwar Sarang Rembang, Indonesia

*Corresponding Author: ahmadmusonnif@staialanwar.ac.id

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
2 September 2024	13 December 2024	6 January 2025	31 January 2025

Abstract

This study aims to analyze the interactions and responses of the Nahdlatul Ulama (NU) community toward the attitudes of the Indonesian Islamic Da'wah Institute (LDII) by examining the moderation practices implemented by NU figures and the community in Dasun Village, Lasem Sub-district, Rembang, Central Java. The research employs a qualitative approach with a field research methodology. The selection of research subjects was conducted using purposive sampling, focusing on informants with in-depth knowledge of NU's moderatism in Dasun Village. The primary subjects include religious and community leaders, village heads, officials, and religious figures affiliated with both NU and LDII, as well as four community members actively engaged in local activities. Data were collected through observation, interviews, and documentation, while data analysis was carried out using data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings, analyzed through Talcott Parsons' theory of social change, reveal two key aspects. First, the social interactions of NU members reflect positive engagement, which extends beyond mere spatial coexistence to active participation in both social and religious activities. Second, viewed through Parsons' AGIL framework, NU religious and community leaders in Dasun successfully eliminated socio-religious barriers by fostering unity in communal events without emphasizing specific organizational or ideological affiliations. This approach aimed to build solidarity, cohesiveness, and shared responsibility. Furthermore, the integration of religious and community leaders played a crucial role in leveraging social dynamics to mobilize residents toward harmonious coexistence. This was achieved by maintaining togetherness, social cohesion, and latent solidarity, as well as preserving local traditions and cultural practices. These findings contribute to the theoretical discourse on religious moderation and social integration by demonstrating how grassroots leadership fosters harmony in pluralistic communities.

Keywords: Nahdlatul Ulama (NU), Indonesian Islamic Da'wah Institute (LDII), Religious Moderation, Social Interaction, Talcott Parsons, AGIL Framework.

How to cite: Humam, A. W. K., Huda, N., & Alfi, A. M. (2025). Dinamika Moderasi Beragama di Rembang Jawa Tengah: Interaksi Nahdlatul Ulama dan LDII dalam Perspektif AGIL. *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 34(1), 49–78. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v34i1.2562>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Moderasi beragama akhir-akhir ini menjadi sorotan paling tajam pemerintah Indonesia. Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan selalu berkomitmen meneguhkan moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Alasannya adalah karena moderasi beragama dianggap dapat menjaga kerukunan dan kesatuan bangsa Indonesia.¹ Sorotan ini didasarkan pada Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang menunjukkan bahwa “indeks kerukunan beragama menurun dari 75,4% pada tahun 2015 menjadi 73,8% pada tahun 2019”. Selain itu berita maupun kasus intoleran dan radikalisme telah menjadi konsumsi publik dan menjadi kegiatan yang populis², misalnya aksi massa 212 yang secara jelas memperlihatkan aksi intoleran.³

Dalam menjalankan misi di atas, presiden Jokowi merasa perlu menunjuk menteri agama dari kalangan TNI untuk mengurus isu radikalisme dan intoleransi beragama yang sedang mengancam kesatuan bangsa.⁴ Demikian juga dengan penunjukan Yaqut Cholil Qoumas yang menggantikan Fahrul Razi sebagai menteri agama saat reshuffle kabinet pada 22 Desember 2021, diindikasikan juga tidak lepas dari dua “pekerjaan rumah” kementerian agama tersebut. Pasalnya Yaqut dikenal sebagai orang yang sangat vokal dan kritis dalam merespon isu-isu radikal di Indonesia.⁵

Dalam lintasan sejarah, Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi sosial keagamaan yang memperjuangkan ajaran Islam yang berpedoman pada nilai-nilai tasāmuh (toleran), tawassuṭ (moderat), tawāzun (seimbang), dan i‘tidāl (tegak lurus).

¹ PDSI KOMINFO, “Dorong Penguatan Moderasi Beragama Di Tengah Kehidupan Masyarakat,” Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2021, <http://content/detail/33719/dorong-penguatan-moderasi-beragama-di-tengah-kehidupan-masyarakat/0/berita>.

² Vedi R Hadiz, *Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2019).

³ Fathiyah Wardah, “Survei LSI: Gerakan 212 Picu Naiknya Intoleransi di Indonesia,” VOA Indonesia, 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/survei-lsi-gerakan-212-picu-naiknya-intoleransi-di-indonesia/4585895.html>.

⁴ Marlinda Oktavia Erwanti, “Jokowi Pilih ‘Menag TNI’ untuk Urus Radikalisme dan Intoleransi,” 2021, <https://news.detik.com/berita/d-4758697/jokowi-pilih-menag-tni-untuk-urus-radikalisme-dan-intoleransi>.

⁵ Indonesia CNN, “PR Besar Menag Yaqut Cholil Benahi Kerukunan Beragama di RI,” 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201223063156-32-585459/pr-besar-menag-yaqut-cholil-benahi-kerukunan-beragama-di-ri>.

Implementasi nilai-nilai tersebut diharapkan mampu menjadikan anggotanya moderat sesuai khittah NU 1926.⁶ Nilai-nilai moderasi yang digaungkan oleh NU ini tidak bertentangan dengan nilai moderasi beragama yang sedang digalakkan oleh pemerintah dan bahkan saling menguatkan. Sehingga keduanya dalam konteks Indonesia sangat mungkin untuk berjalan beriringan dalam mewujudkan Indonesia damai dan toleran serta menjaga keutuhan bangsa.

Kecamatan Lasem kabupaten Rembang dalam konteks berdirinya NU merupakan daerah istimewa, karena di antara para pendiri organisasi tradisional tersebut berasal dari Lasem, seperti KH. Ma'sum Ahmad, KH. Kholil Masyhuri dan KH. Baidlawi Abdul Aziz. Sehingga Lasem yang notabene kecamatan menjadi satu-satunya cabang istimewa setara kabupaten (PCNU) yang pada bulan Februari tahun 1926 secara resmi dideklarasikan bersama sepuluh cabang NU lainnya.⁷ Namun kenyataan demikian tidak menjadikan ketersebaran paham NU secara keseluruhan di Lasem, bahkan di desa Dasun yang secara geografis letaknya berdekatan dengan kota Lasem, NU lebih junior jika dibandingkan dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Pujiyono mengatakan bahwa masjid Baitur Rasyidin yang berafiliasi LDII jauh lebih dulu berdiri 30 tahun dari pada masjid Baitus Salam yang berafiliasi NU yang didirikan pada tahun 1994.⁸ Namun sayang tidak diketahui secara pasti penyebab mengapa NU datang belakangan di Dasun, karena mayoritas orang NU Dasun adalah pendatang, sedangkan warga LDII Dasun cenderung tertutup Ketika diwawancarai. Cerita yang berkembang hanya sebatas bahwa LDII Dasun lebih dulu ada karena dakwah tokoh LDII Rembang yang dilakukan secara massif di Dasun pada tahun 1950an dengan mengadakan pengajian rutin setiap minggunya. Disisi lain masyarakat Dasun tergolong abangan dan kurang mendapatkan perhatian oleh para kyai Lasem dalam konteks dakwah. Sehingga menjadikan masyarakat Dasun dalam sejarahnya lebih banyak menganut paham LDII.⁹

⁶ PBNU, *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 NU cet II* (Jakarta: Lembaga Ta'lif wa an-Nasyr, 2016).

⁷ Lusi Handayani, "Peran KH. Ma'shum Ahmad dalam mendirikan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang (1926-1972)" (Thesis, Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 32.

⁸ Pujiyono, Wawancara Tokoh Agama, Dasun, 7 November 2023. Ia menuturkan bahwa jarak antara pendirian masjid LDII dan NU terpaut tiga dasa warsa.

⁹ Wawancara Sujarwo, kepala desa Dasun, 12 Desember, 2023.

Dodi mengatakan LDII sendiri dicurigai sebagai Islam eksklusif di dalam kancan doktrin ideologi yang pernah bermetamorfosis dengan merubah-rubah namanya sebanyak tujuh kali.¹⁰ Ideologi tersebut diformulasikan ke dalam doktrin “sistem 354”. Angka tiga menunjuk pada al-Qur’an, Hadis, dan Jama’ah. Angka lima menunjukkan 5 sumpah bai’at kepada amir, yakni mengaji, mengamal, membela, sambung jama’ah dan menaati Allah SWT, Rasulullah SAW, dan amir. Sementara angka empat menunjuk kepada sikap bersyukur, mengagungkan amir, sungguh-sungguh, dan berdoa.¹¹

Doktrin LDII juga tampak nyata di desa Dasun. Kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh warga LDII menunjukkan sikap eksklusif. Iwan yang merupakan mantan anggota dan warga LDII Dasun menyatakan bahwa pengajian yang dilaksanakan di masjid Baitur Rasyidin sangat tertutup. Hanya anggota LDII saja yang diperbolehkan mengikuti pengajian. Anak-anak tidak diperbolehkan mengaji kepada guru lain di luar keanggotaan LDII. Bahkan, salah satu bagian dari kepercayaan mereka adalah wajibnya mensucikan masjid saat dipakai oleh warga di luar keanggotaan LDII.¹² Namun, Belakang ini kebiasaan menganggap orang lain “najis” mulai terkisis dan agak longgar.

Sikap lain yang ditunjukkan oleh LDII Dasun adalah menikahkan anak mereka dengan warga NU. Misalnya Bisri yang berlatar LDII mengambil mantu warga NU. Hal demikian menjadikan adanya keharmonisan dan sudah mulai adanya keterbukaan warga LDII Dasun terhadap warga di luar komunitasnya. Bahkan hampir setiap acara desa, Sujarwo sebagai kepala desa mengungkapkan bahwa ketua panitia acara selalu saja dipilih dari warga yang berafiliasi LDII.

Nilai-nilai inklusif dan moderatisme warga nahdliyyin barang kali menjadi salah satu faktor diterimanya NU di desa Dasun yang saat ini ditetapkan sebagai Desa Pemajuan Kebudayaan.¹³ Tentu saja, peran tokoh agama (Kiai) dalam hal ini

¹⁰ Limas Dodi, “Metamorfosis Gerakan Sosial Keagamaan: Antara Polemik, Desiminasi, Ortodoksi, dan Penerimaan terhadap Ideologi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII),” *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 1 (18 Mei 2017): 33–36, <https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i1.880>.

¹¹ Masdar Hilmy, “The Configuration of Radical Islamism in Indonesia: Some Contemporary Assessments and Trajectories,” *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam* 14, no. 1 (1 Mei 2014): 11, <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v14i1.84>.

¹² Iwan, Wawancara Mantan Anggota LDII, Dasun, 7 November 2023.

¹³ Berdasarkan SK. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi no. : 1134/F5/KB.02.04/2021, Dasun terpilih sebagai salah satu Desa Pemajuan Kebudayaan bersama 358 Desa lainnya se Indonesia.

menempati kedudukan yang penting. Empat pilar ajaran ke-NU-an (*tasāmuḥ*, *tawassuṭ*, *tawāzuṅun*, dan *i'tidāl*) secara berkala diajarkan dan diimplementasikan para kiai Dasun dalam meraih simpati warga. Sehingga tidak heran, walaupun keberadaan NU yang jauh lebih “muda” dari LDII ternyata pelan tapi pasti menjadi organisasi keagamaan mayoritas di desa tersebut dan bahkan dapat hidup berdampingan dengan LDII.

Sikap eksklusif LDII sepertinya direspon positif oleh para tokoh agama NU di desa Dasun. Moderatisme NU dibangun melalui sikap tokoh agama Dasun yang gemar mengajak dialog dengan sesama warga, saling menghormati, tidak menyatakan paling benar, tidak saling menyalahkan satu sama lain, dan menjadikan perbedaan sebagai rahmat yang perlu diinternalisasikan kepada setiap warga.¹⁴

Salah satu hal yang paling mencolok dari moderatisme NU Dasun adalah tidak dibentuknya struktur pengurus ranting NU dengan alasan menjaga harmoni antar warga. Selain itu juga menamai status masjid Baitus Salam sebagai masjid desa, bukan masjid NU. Status masjid tersebut, meminjam istilah Talcott Parsons, merupakan bagian dari sistem tindakan berupa adaptation (adaptasi), yakni bentuk penyesuaian diri pada lingkungan. Karena fakta menyebutkan bahwa keberadaan dan kemunculan LDII di desa Dasun lebih dahulu dari pada NU. Dengan sikap inklusif NU tersebut, goal (tujuan) yang diharapkan adalah terjadinya harmonisasi antara warga NU dan LDII desa Dasun sehingga dapat hidup berdampingan, damai, dan toleran.

Penelitian baik tentang NU maupun moderasi beragama sudah banyak dilakukan. Fuad menyimpulkan bahwa faktor terpenting perlunya moderasi Islam dalam tubuh NU adalah penguatan arus globalisasi yang diwujudkan dengan konsep Islam Nusantara.¹⁵ Sedangkan Salik mengemukakan bahwa NU dengan gagasannya “Islam Nusantara” sejalan dengan konsep moderasi beragama dalam rangka menangkal radikalisme di Indonesia.¹⁶ Dalam konteks yang sama Mas’ud juga membahas bagaimana NU mengusung paham moderasi beragama, terlebih soal

¹⁴ Munawir Haris, “Islam Moderat Konteks Indonesia Dalam Perspektif History,” *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 7, no. 2 (2015): 258.

¹⁵ A Jauhar Fuad, “Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 31, no. 1 (2020): 153–68, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.991>.

¹⁶ Mohammad Salik, *Nahdlatul Ulama dan Gagasan Moderasi Islam* (Malang: Edulitera, 2020).

bagaimana hidup berdampingan dengan damai adalah ekspresi dari Islam kultural atau Islam moderat.¹⁷

Dalam tulisannya, Saenong menegaskan bahwa dari ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia NU adalah garda depan sebagai organisasi yang mengadvokasi praktik-praktik keagamaan dengan mengakomodasi budaya lokal, sejauh tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam.¹⁸ Hamdi menyoroiti bahwa bersatunya NU-FPI di Bangkalan Madura karena sikap dari tokoh NU, kyai Hasyim Muzadi yang mengakui Habib Rizq sebagai bagian dari NU.¹⁹ Hamdani yang meneliti tentang pemahaman moderat (wasathiyah) di komunitas pemuda NU menyimpulkan bahwa komunitas ini secara khusus dibentuk untuk merespon kritik sebagian orang yang melakukan *black campaign* terhadap konsep Islam Nusantara.²⁰

Berbeda dengan dengan penelitian yang telah ada, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap moderasi yang diperankan oleh masyarakat dan tokoh NU desa Dasun kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Setidaknya penelitian ini mengembangkan dari tesisnya Fuad, Salik, Mas'ud, dan Hamdani. Bedanya adalah bahwa ketiga peneliti pertama hanya menggagas konsep, dan yang terakhir menyoal misi yang terstruktur, sedangkan penelitian yang dilakukan adalah pengembangan dari seluruhnya, baik konsep maupun praktik. Menariknya, objek formal dalam penelitian ini sudah berkembang lama sebelum konsep moderasi beragama. Untuk mencapai hal tersebut penelitian ini meminjam teorinya Talcott Parsons tentang perubahan sosial dan struktural fungsional. Teori ini dipandang relevan karena dapat menggambarkan dinamika moderatisme yang diperankan oleh masyarakat dan tokoh NU Dasun sehingga dapat hidup berdampingan dan harmoni.

¹⁷ Abdurrachman Mas'ud, *Intelektual Pesantren: Perbelatan Agama dan Tradisi* (Yogyakarta: LKiS, 2004).

¹⁸ Faried F. Saenong, "Nahdlatul Ulama (NU): A Grassroots Movement Advocating Moderate Islam," dalam *Handbook of Islamic Sects and Movements* (Brill, 2021), 129–50, https://doi.org/10.1163/9789004435544_009.

¹⁹ Ahmad Zainul Hamdi, "Radicalizing Indonesian Moderate Islam From Within: The Nu-fpi Relationship in Bangkalan, Madura," *Journal of Indonesian Islam* 7, no. 1 (2013): 71–95, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.1.71-95>.

²⁰ Hamdani Hamdani, "Defending Islam Nusantara at the Frontline," *ISLAM NUSANTARA: Journal for the Study of Islamic History and Culture* 2, no. 1 (2021): 21–40, <https://doi.org/10.47776/islamnusantara.v2i1.103>.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.²¹ Data lapangan (*field research*) akan digunakan sebagai basis, karena menyesuaikan relevansi dengan tema penelitian. Sebab itu, peneliti akan terjun lapangan langsung untuk menggali dan memperoleh data.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai Desember 2023 di desa Dasun Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Pemilihan subjek penelitian berdasarkan purposive sampling di mana peneliti meminta informasi yang memang memahami data terkait dengan moderatisme NU di desa Dasun. Misalnya para tokoh NU seperti Sujarwo dan Pujiyono yang mengetahui sejarah sekaligus pelaku. Selain itu juga mewawancarai Iwan sebagai eks LDII. Subjek primer penelitian ini adalah tokoh-tokoh agama dan masyarakat, baik kepala desa, perangkat, tokoh agama yang berafiliasi pada NU dan LDII dan (4) empat anggota masyarakat yang aktif dalam kegiatan di desa Dasun. Pengambilan data dilakukan dengan cara yang pertama, wawancara secara mendalam untuk menggali tentang moderatisme NU desa Dasun dan perubahan sosial perspektif Talcott Parsonn di desa Dasun. Kedua, observasi non partisipan yang digunakan untuk melihat dan mengamati moderatisme dan perubahan sosial masyarakat desa Dasun berikut dokumentasi yang dipakai untuk menggali informasi tentang profil desa Dasun dan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan di desa Dasun. Ketiga, setelah data terkumpul, Langkah berikutnya adalah menganalisisnya berdasarkan konsep moderatisme dan teori perubahan sosial Talcott Parson. Langkah berikutnya adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Moderasi Beragama

Dalam bahasa Arab, moderasi disebut dengan term *wasathiyah* (moderat), *i'tidal* (adil) dan *tawazun* (seimbang). Seseorang yang mengimpelemntasikan sikap *wasathiyah*

²¹ Emy Susanti, "Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar," dalam *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2010), 165.

²² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 89–90.

disebut dengan *wasith*. Dalam bahasa Indonesia, kata *wasith* memiliki tiga makna yaitu 1) penengah, perantara, 2) pemisah, pendamai, pelerai antara yang berselisih dan 3) pemimpin pertandingan. Adapun lawan dari kata *wasthiyah* adalah *tatbarruf* (berlebihan) yang dalam bahasa Inggris maknanya adalah *extreme, radical, excessive*. Dalam bahasa Arab, lafaz yang memiliki terminologi yang sama dengan *extreme* adalah *ghulum* dan *tasyaddud* yang artinya adalah keras dan tegas. Dalam konteks beragama, kata ini dapat dimaknai dengan sikap ekstrem dan melebihi batas serta ketentuan syara'.

Secara terminologi, moderasi beragama dimaknai sebagai perspektif, sudut pandang, perilaku dan sikap untuk memosisikan diri selalu berada di tengah-tengah dan tidak ekstrim dalam beragama. Moderasi beragama dipahami sebagai sikap yang seimbang dalam praktik keagamaan sendiri (eksklusif) dan menghormati praktik keberagamaan orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Moderasi beragama adalah kunci terciptanya kerukunan umat beragama baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Kunci keseimbangan dalam beragama adalah adanya penolakan terhadap ektrimisme dan liberalisme dalam beragama.²³ Untuk mewujudkan moderasi beragama, tidak cukup hanya dengan pengakuan terhadap kemajemukan beragama, tetapi harus diimplementasikan dalam keterlibatannya secara aktif terhadap kenyataan tersebut.

Keberanian tidak hanya terdapat dalam kelompok tertentu saja, tetapi pada kelompok yang lain juga dimungkinkan ada kebenaran, termasuk kelompok beragama sekalipun. Pemahaman ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua agama membawa ajaran keselamatan. Artinya, bahwa ajaran yang dibawa oleh para Nabi dari generasi ke generasi hanya berupa syari'at saja.²⁴ Agama menjadi pedoman hidup dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan dan bermasyarakat. Agama harus diposisikan sebagai cara pandang dan perspektif yang seimbang antara urusan dunia dan akhirat, akal dan hati, norma dan rasio, individu dan kelompok serta fakta dan idealisme. Hal ini sesuai dengan tujuan diturunkannya agama di muka bumi ini sebagai tuntunan hidup, untuk menjawab berbagai persoalan duniawi, baik dalam skala mikro maupun makro, ranah keluarga maupun publik.²⁵

²³ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 16–17.

²⁴ Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, 5 ed. (Bandung: Mizan, 1999), 251.

²⁵ A Akhmadi, "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia'S Diversity," *Inovasi: Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 50.

Sikap keberagaman seseorang biasanya diukur oleh dua hal, wahyu dan akal. Pemahaman seseorang terhadap teks (wahyu) secara tekstual, akan mengakibatkan sikap konservatif. Sedangkan keterpihakannya pada akal secara berlebihan juga akan mengakibatkan sikap ekstrim kiri. Seseorang yang mengambil sikap moderat ia akan memposisikan wahyu dan akal secara seimbang. Berikut beberapa indikator moderasi beragama yaitu 1) komitmen kebangsaan, 2) toleransi, 3) anti kekerasan dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal.

Komitmen kebangsaan dijadikan indikator utama untuk melihat sejauh mana sikap, perspektif dan sudut pandang seseorang terhadap praktik beragama berdampak pada penerimaannya terhadap Pancasila sebagai ideologi kebangsaan, sikapnya terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan nasionalisme. Sebagai bukti kongkrit dari komitmen kebangsaan adalah penerimaannya terhadap prinsip beragama yang termuat dalam UUD 1945.²⁶

Toleransi beragama yang dimaksud adalah toleransi antar umat beragama dan intra agama, baik menyangkut kehidupan sosial maupun politik. Toleransi sendiri adalah sikap memberi ruang kepada orang lain dan membiarkan orang lain untuk berkeyakinan sesuai dengan agamanya, mengekspresikan keagamaannya dan menyampaikan pendapat, meski pendapat tersebut sangat berbeda dengan keyakinan kita. Toleransi menjadi pondasi penting dalam menghadapi segala bentuk perbedaan. Toleransi sangat penting sebagai sikap dalam berdemokrasi, karena demokrasi akan bisa berjalan jika seseorang mau menerima pendapat orang lain, dan menahan pendapatnya. Semakin tinggi tingkat toleransi seseorang terhadap perbedaan yang ada, maka bangsa Indonesia akan semakin demokratis, dan begitu sebaliknya.

Anti kekerasan (radikalisme) dalam konteks moderasi beragama dimaknai dengan ideologi dan paham yang ingin melakukan perubahan terhadap sistem sosial dan politik dengan cara-cara yang keras dengan mengatasnamakan agama, baik secara verbal, fisik maupun gagasan. Kelompok radikal biasanya menginginkan adanya perubahan secara singkat dan revolusif, yang bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Radikalisme umumnya muncul akibat persepsi keterancaman dan ketidakadilan yang dialami oleh orang tertentu atau kelompok tertentu. Baik

²⁶ RI, *Moderasi Beragama*, 43.

ketidakadilan dalam ranah sosial, politik, ekonomi, keagamaan dan lain-lain. Sikap ini akan muncul jika dilakukan dengan mengumbar kebencian terhadap kelompok tertentu yang dianggap sebagai penyebab ketidakadilan dan pengancam eksistensinya. Akomodatif terhadap budaya lokal penting dilakukan untuk melihat seberapa jauh seseorang atau kelompok tertentu menerima praktik keagamaan yang mengakomodasi budaya lokal. Orang yang moderat biasanya akan lebih ramah dalam menyikapi budaya lokal atau tradisi dalam praktik keagamaannya, sejauh budaya lokal tersebut tidak bertentangan dengan agama. Sedangkan orang yang tidak akomodatif terhadap budaya dan tradisi biasanya berdalih bahwa sikap tersebut justru akan mengotori kemurnian agama.²⁷

Sumber dan Legitimasi Moderasi Beragama di Indonesia

Secara umum, sumber legitimasi moderasi agama meliputi sumber dari ajaran Islam, historis, sosiologis, dan yuridis. *Pertama*, sumber legitimasi dari Islam adalah Islam itu sendiri yang merupakan agama wasat (moderat), sebagaimana bunyi QS. Al-Qassas ayat 77. Ayat tersebut memerintahkan manusia agar menjadi pribadi yang saleh, dan tetap memikirkan kehidupan duniawi. Kedua aspek tersebut menjadi kunci keseimbangan, yang harus dimunculkan dalam diri manusia sebagai ummatan wasatan. *Kedua*, sumber historis. Secara historis, penyebaran Islam di Indonesia dalam rangka menambah pemeluk baru dilakukan dengan tanpa kekerasan. Ajaran agama yang praktikkan pun jauh dari sikap-sikap ekstrem. Hal ini terbukti dengan adanya keragaman kelompok keagamaan di dalam agama-agama. Fakta ini sekaligus menunjukkan bahwa moderasi beragama adalah sikap bawaan masyarakat Indonesia. *Ketiga*, sumber sosiologis.

Berislam di Indonesia mengharuskan masyarakatnya memiliki kesadaran penuh bahwa Indonesia terdiri dari etnis, budaya dan agama yang berbeda-beda. Dengan kata lain, umat Islam di Indonesia dituntut memiliki wawasan dan kesadaran kebangsaan yang baik. *Keempat*, sumber yuridis. Terbentuknya NKRI memberikan konsekuensi bahwa negara menjamin warganya untuk menjalankan ajaran-ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hal ini telah menjadi konsensus para pendiri bangsa

²⁷ RI, 46.

pada saat proses terbentuknya NKRI. Kebebasan menjalankan ajaran agama tertuang dalam UUD pasal 29 tentang kebebasan beragama. Jaminan ini konsekuensinya adalah bahwa negara memastikan tidak ada yang berhak memaksa penganut agama tertentu tentang pemahaman agamanya di ranah publik yang dapat mengganggu penganut agama lain.²⁸

Moderasi Beragama Sebagai Life Style

Di antara kunci keberhasilan moderasi beragama di Indonesia adalah peran keteladanan dalam sikap dan tutur kata para tokoh agama dalam kehidupan sosial. Ceramah yang edukatif, tidak provokatif dan tidak mengandung ujaran kebencian, harus ditingkatkan terutama oleh para tokoh agama agar tercipta suasana yang kondusif dan aman. Karena itu, perlu ada kampanye-kampanye tentang moderasi beragama tidak hanya di tingkat nasional, tetapi di setiap desa atau kelurahan agar warganya dapat memahami moderasi beragama tersebut sebagai life style keseharian mereka.

Untuk menciptakan warga yang sadar dan melek tentang moderasi beragama, diperlukan juga kesadaran kolektif dari seluruh lapisan masyarakat untuk memahami dan mempraktikkan moderasi beragama secara nyata dalam kehidupan sosial mereka. Bahkan jika perlu, pemerintah mengajak para pemangku kebijakan di pemerintahan, para tokoh agama, para guru, pengurus FKUB, para penceramah dan da'i untuk mengikuti sekolah moderasi beragama.²⁹

Di Indonesia, proyeksi dan kampanye moderasi beragama yang ingin dicapai adalah inklusif (masyarakat yang terbuka dalam menyikapi perbedaan dan kemajemukan, moderat (masyarakat yang tidak keras, radikal dan ekstrim), toleran (menghormati dan menghargai perbedaan aliran, keyakinan dan agama), equality (persamaan hak di depan hukum), peace (keberadaan masyarakat yang aman dan damai), freedom (tidak adanya paksaan untuk memeluk agama dan berkeyakinan), dan sustainable (program yang sifatnya berkelanjutan).³⁰

²⁸ Ali Muhtarom, "Moderasi Beragama dalam Pribumisasi Pendidikan Islam," dalam *Menanam Kembali Moderasi Beragama Untuk Merajut Kebhinekaan Bangsa* (Jakarta: Teras Karsa, 2021), 33.

²⁹ Muhammad Qasim, *Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan* (Makassar: Alauddin University Press, 2020), 65; Zainuddin, *Proyeksi Moderasi Beragama di Indonesia* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021), 7.

³⁰ Zainuddin, *Proyeksi Moderasi Beragama di Indonesia*, 7.

Sistem Sosial dan Struktural Fungsional Perspektif Talcott Parsons

Parsons memandang sistem sosial sebagai bagian dari interaksi. Di dalam sistem sosial, interaksi bukan satu-satunya hal yang menjadi fokus kajian, namun Parsons juga mengutamakan komponen struktural dan peran individu sesuai posisinya. Dalam hal analisis, Parsons tidak hanya mengutamakan struktur melainkan juga dengan fungsionalnya. Masyarakat merupakan bagian dari struktur yang diatur oleh sebuah sistem. Setiap komponen terintegrasi berdasarkan fungsi masing-masing. Pada dasarnya, semua akan berjalan dengan baik dan seimbang. Munculnya konflik dikarenakan adanya komponen yang tidak sesuai dengan fungsi yang semestinya.³¹

Secara sistematis, keterkaitan antara struktural, fungsional, dan interaksi dijabarkan dalam beberapa hal. Pertama, sistem sosial harus disusun secara rapi dan terstruktur sehingga harmonisasi dengan sistem lainnya akan terwujud. Kedua, di lapangan, implementasi sistem sosial meniscayakan dukungan dari sistem lainnya. Ketiga, kebutuhan para individu di dalam sistem sosial harus terpenuhi. Keempat, sistem sosial mampu menghadirkan perhatian dari para anggotanya. Kelima, ancaman, gangguan, dan konflik harus mampu dikendalikan oleh sistem sosial. Keenam, bahasa merupakan hal nyata dan niscaya yang dibutuhkan oleh sistem sosial dalam menjalin sebuah interaksi.³²

Teori Parsons yang dikenal dengan teori struktural fungsional mempopulerkan empat paradigma fungsi tindakan yang disebut dengan skema "AGIL". Teori tersebut menekankan keteraturan dan mengabaikan konflik di dalam masyarakat. Empat paradigma fungsi ini sejatinya merupakan bentuk kolaborasi antara Parsons, Robert Bales dan Edward Shils tentang persoalan yang dihadapi sistem dalam grup skala kecil dengan variabel yang digagas dan dikembangkan Parsons. Hal pertama yang digunakan di dalam paradigma ini merupakan model yang terkait dengan tipe kontrol sosial. Paradigma tersebut hanya terbatas pada persoalan yang dihadapi sistem dan berkaitan

³¹ Abdul Jamil Wahab, *Harmoni di Negeri Seribu Agama* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), 25.

³² Nunung Prajarto, "Perbandingan Sistem serta Hubungan antara Sistem Komunikasi, Sistem Sosial, dan Sistem Politik," *Modul 2: Pendekatan dalam Perbandingan Sistem Komunikasi 2.1*, 2014, 14.

dengan setiap masalah pada kombinasi orientasi tindakan yang mampu memberikan solusi persoalan tersebut.³³

Sebagai upaya untuk mempertahankan stabilitas masyarakat agar tetap eksis dan seimbang, maka perlu menjawab beberapa prasyarat fungsionalnya. Keempat fungsi tersebut adalah; **a) Adaptasi (*adaptation*)**; fungsi adaptasi terhadap lingkungan yang mampu menjamin keberlangsungan hidup masyarakat supaya tetap eksis dan bertahan lama. Adaptasi berfungsi untuk menyelesaikan persoalan sistem dengan cara memobilisasi berbagai sumber dasar dalam merealisasikan tujuan. Sepanjang kepribadian bersifat spesifik dan netral, solusi masalah adaptasi mampu menyelesaikan kombinasi universalitas dan penampilan kategorisasi objek;³⁴ **b) Tujuan (*goal*)**; sebuah sistem harus mencapai dan menjelaskan tujuan utamanya. Sebab sistem bisa dikatakan berfungsi manakala diorientasikan menuju ke sebuah tujuan sesuai apa yang telah dirancang.³⁵ Fungsi tujuan adalah untuk menyelesaikan mekanisme yang memerbolehkan untuk membuat tujuan menjadi tersusun secara apik dalam setiap situasi yang spesifik dimana pilihan tujuan harus dibuat; **c) Integrasi (*integration*)**; sebuah sistem semestinya mengatur antar hubungan bagian yang menjadi komponennya. Fungsi integrasi juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi lainnya. Integrasi membuat kesatuan unit dalam sistem dengan segala variannya yang saling membentuk solidaritas (aktor dalam sebuah sistem sosial memerlukan disposisi dalam sistem personal dan simbol dalam sistem kebudayaan);³⁶ **d) Latensi (*latency*)**; sasaran akhir pada sebuah sistem adalah tepeliharanya setiap model dan norma (*latent pattern*). Fungsi latensi ini adalah memelihara pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang model atau norma tersebut.³⁷ Dengan demikian setiap sub sistem meniscayakan fungsi “AGIL” supaya tetap eksis dan seimbang.

Demografi Desa Dasun

³³ Richard Munch, “Talcott Parsons and the Theory of Action. II. The continuity of the development,” *American Journal of Sociology* 87, no. 4 (1982): 771.

³⁴ Munch, 775.

³⁵ Andina Prasetya, Muhammad Fadhil Nurdin, dan Wahyu Gunawan, “Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal,” *SOSIETAS* 11, no. 1 (2021): 936, <https://doi.org/10.17509/sosietas.v11i1.36088>.

³⁶ Munch, “Talcott Parsons and the Theory of Action. II. The continuity of the development,” 771.

³⁷ Prasetya, Nurdin, dan Gunawan, “Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal,” 936.

Untuk menjelaskan tentang moderatisme NU dan perubahan sosial masyarakat desa Dasun, setidaknya perlu diketahui terlebih dahulu kondisi geografis, demografi, dan keberagaman atau interaksi sosial keagamaan antara NU dan LDII. Dasun adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Lokasi desa Dasun ini berjarak 3 km dari Kecamatan Lasem dan 14 km dari pusat Kabupaten Rembang. Sebelah utara Dasun berbatasan dengan laut Jawa, sebelah selatan dengan desa Soditan, sebelah barat dengan desa Gedongmulyo dan sebelah timur berbatasan dengan desa Tasiksono. Dasun merupakan pintu gerbang Lasem. Berbagai kebudayaan dan Ilmu pengetahuan pada zaman dulu masuk melalui sungai Dasun sebelum akhirnya menyebar ke pedalaman.³⁸

Sesuai dengan data monograf tahun 2023, jumlah penduduk Dasun adalah 970 orang dengan jumlah KK 308 orang. Dengan rincian jenis kelaminnya, laki-laki 492 dan perempuan 478 orang. Luas wilayahnya mencapai 127,111 ha. Semuanya beragama Islam. Dari total jumlah penduduk secara keseluruhan yaitu 970 jiwa, paham keagamaan masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu 65% LDDI (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) dan 35% penganut paham NU. Prosentase ini wajar karena LDDI jauh lebih duluan hadir di Dasun dibanding NU.

Secara pasti tidak diketahui kapan LDDI masuk ke Dasun dan siapa pembawanya. Namun menurut penuturan dari Sujarwo (kepala desa Dasun 2007-sekarang), masuknya paham LDII di Dasun diperkirakan tahun 1960-an dibuktikan dengan berdirinya masjid LDDI yang tertulis tahun 1960. Masjid ini bernama Baitur Rosyidin. Lokasinya berjarak sekitar 600 m dari masjid desa. Penyebutan masjid desa sendiri – tidak masjid NU – dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan skat dan pembatas antara NU dengan LDII. Menurut keterangan dari masjid desa ini baru dibangun pada tahun 1994.³⁹

Dalam perjalanannya, masjid LDII di Dasun sangat terbuka. Siapa pun yang ingin beribadah kepada Allah di dalamnya, termasuk masyarakat di luar LDII tidak dihalang-halangi. Masjid ini juga tidak memasang plang identitas yang menunjukkan kepemilikan atas masjid tersebut. Hal ini cukup untuk menepis tuduhan bahwa masjid

³⁸ Exsan Ali Setyonugroho, *DASUN: Jejak Langkah dan Visi Kemajuannya* (Yogyakarta: Lintas Nalar, 2021), 19.

³⁹ Sujarwo, Wawancara Kepala Desa. Dasun, 12 Desember 2023.

LDII sangat eksklusif dan sekaligus menjawab stigma tentang kebiasaan mengepel masjid LDII setelah digunakan oleh masyarakat di luar anggota LDII.⁴⁰

Dasun adalah desa kecil tetapi unggul dalam sejarah, khususnya di bidang perkapalan. Dulu, Dasun dikenal sebagai pusat galangan kapal Belanda dan Jepang. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya dok-dok yang ada di sepanjang sungai Dasun hingga sekarang. Bahkan sebagaimana diungkapkan Exsan Ali Setyonugroho, galangan kapal di Dasun sudah ada sejak kerajaan Majapahit. Dimana pada waktu itu, Lasem dipimpin oleh Dwitendhu Dewi, yang bergelar *Bhre Lasem*. Sedangkan suaminya, Rajasa Wardana digelari sebagai Dhang Phuawang atau penguasa pelabuhan-pelabuhan di Lasem. Di pelabuhan-pelabuhan tersebut di antaranya ada galangan kapal dan bengkel perbaikan kapal perdagangan yang lokasinya berada di Dasun.⁴¹

Mengenai asal usul desa Dasun, menurut Exsan ada tiga versi. Dimana asal usul desa tersebut erat kaitannya dengan peran Dasun yang dulunya adalah tempat galangan kapal dan tempat masuknya opium/candu melalui sungai Dasun Lasem. *Pertama*, Dasun diambil dari kata “*Ndas-dasane Dusun*” karena pada saat itu Dasun menjadi tempat memproduksi kapal-kapal militer Majapahit dan Demak. *Kedua*, Dasun asal usulnya dari “*Das Susun-Susun*”. Penamaan ini berawal ketika adanya aktivitas penyelundupan opium di Dasun melalui sungai. Sehingga siapa pun yang dilihat oleh para penyelunduk akan dibunuh. Saking banyaknya orang yang terbunuh, kemudian muncul istilah “*Ndas Susun-Susun*”. Hal ini dibuktikan dengan adanya rumah Lawang Ombo yang di dalamnya terdapat lorong yang tembus sampai ke sungai Lasem. *Ketiga*, kata Dasun diyakini dari nama Daisun, seorang berkebangsaan Tiongkok yang berdomisili di Dasun akibat kapalnya terdampar di Dasun. Walhasil, Daisun diangkat oleh masyarakat setempat sebagai pemimpin di wilayah itu. Dikabarkan juga Daisun menjadi mua’llaf dan berganti nama menjadi Kongso.⁴²

Desa Dasun dan lima desa lainnya di Kabupaten Rembang yaitu Tritunggal, Punjulharjo, Pasarbanggi, Gedongmulyo dan Tasiksono dijuluki sebagai “*Alas Samudera Wela*”, nama sebuah candi yang dibangun pada zaman Kerajaan Lasem. Candi ini didirikan oleh Dewi Indu, yang diresmikan oleh Prabu Hayam Wuruk, raja

⁴⁰ Mbah Salam, Wawancara Tokoh Agama, Dasun, 7 November 2023.

⁴¹ Setyonugroho, *DASUN: Jejak Langkab dan Visi Kemajuannya*, 85–86.

⁴² Setyonugroho, 20–22.

Majapahit. Candi ini di zaman Majapahit punya peranan penting dalam mempersatukan kawasan pesisir utara dari Sarang sampai Demak. Pemberian julukan terhadap enam desa ini salah satu tujuannya adalah munculnya desa yang berada di daerah pantai yang makmur, aman, damai, ramah, guyub dan terkenal di mana-mana. Harapan isi sesuai dengan tujuan dibuatnya Candi Samudera Wela yaitu musnahnya para durjana dari muka bumi, sehingga siapa pun bebas melintas di desa-desa sampai ke tepi pantai.⁴³

Praktik Keagamaan sebagai Wujud Implementasi Kerukunan

Beberapa praktik keagamaan di desa Dasun sudah menjadi tradisi dan merupakan wadah untuk mengimplementasikan kerukunan di desa Dasun. Diantara praktik keagamaan yang biasa dilakukan masyarakat Dasun adalah tahlilan, *muludan*, dan santunan anak yatim.

1. Tahlilan

Dalam masyarakat Jawa, ada kepercayaan bahwa manusia punya hubungan baik dengan hal yang gaib. Karena itu, menurut Geertz, hubungan antara manusia dengan hal yang gaib dalam dimensi kehidupan termasuk bagian dari kebudayaan.⁴⁴ Kebudayaan yang akhirnya berakulturasi dengan Islam, kemudian membentuk sebuah tradisi yang mengakar di masyarakat. Salah satunya adalah tradisi tahlilan.

Tahlilan dipahami oleh masyarakat sebagai aktivitas yang bernilai ibadah yang pahalanya diperuntukkan bagi orang yang sudah meninggal. Tahlilan ini berfungsi menghidupkan sunnah dan syiar Islam, di samping untuk menumbuhkan kepekaan sosial dan simbol kerukunan serta sarana untuk bersosialisasi.

Di kalangan agamawan, tahlilan dimaknai sebagai tradisi warisan Muslim Champa (Vietnam). Agus Sunyoto mengutip dalam *Les Chams Musulmans de l'Indochine Francaise* menentang keras pendapat yang mengatakan bahwa tahlilan adalah peninggalan Hindu-Budha. Dalam ajaran Hindu-Budha hanya dikenal tradisi peringatan kematian setelah dua belas tahun seseorang meninggal dunia (*sraddha*). Ia mengatakan bahwa yang benar tahlilan kematian pada hari ke-3, ke-7, ke-10, ke-30, ke-

⁴³ Redaksi, "Enam Desa Sepakati Nama 'Alas Samudra Wela,'" *Pemerintah Kabupaten Rembang* (blog), 25 November 2015, <https://rembangkab.go.id/uncategorized/enam-desa-sepakati-nama-alas-samudra-wela/>.

⁴⁴ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), 8.

40, ke-100 dan ke-1000 yang menyebar di masyarakat Islam Nusantara adalah pengaruh dari tradisi keagamaan muslim Champa yang dibawa oleh penyebar Islam dua bersaudara Raden Rahmat (Sunan Ampel) dan Raden Ali Murdadlo (Ali Musada).

Muslim Champa ketika melaksanakan acara kematian memulainya dengan *ngap kamrwai* (do'a), lalu membaca *sunsamillah* (bismillah), kemudian dilanjut dengan *pbwatihah* (al-fatihah) dan pujian kepada Pu Hyang dan ruh para leluhur yang ditutup dengan jamuan makanan dengan mempersilahkan Ong Gru untuk makan terlebih dahulu.⁴⁵

Hingga saat ini, tahlilan masih familiar dalam kehidupan masyarakat Lasem dan sekitarnya, termasuk di Dasun. Masyarakat Nahdliyyin di Dasun ikut bersama-sama merawat tahlilan sebagai tradisi keagamaan yang deviniitif (mapan) dan prevalensi (kelaziman). Tahlilan dilaksanakan selama 7 hari sejak hari pertama orang meninggal dunia. Di malam ke-7, keluarga yang meninggal membuat makanan yang ditaruh di bakul, yang oleh masyarakat setempat disebut dengan berkat. Empat puluh hari selanjutnya, keluarga yang meninggal mengadakan do'a bersama dan bancakan yang disebut dengan istilah patang puluh dino (40 hari). Setelah 40 hari, ada nyatus (100 hari), mendak pisan (peringatan satu tahun), mendak pindo (peringatan dua tahun), dan nyewu (1000 hari). Semua proses ini melibatkan tetangga dan sanak keluarga dengan dipimpin seorang kiai dan atau *modin*.

2. Muludan

Menurut sejarah, ada tiga pendapat tentang asal usul peringatan maulid Nabi Muhammad. *Pertama*, perayaan maulid pertama kali diinisiasi oleh Khaizuran binti Atha' al-Jarsiyah (w. 173 H/789 M), budak perempuan milik al-Mahdi, khalifah ketiga Dinasti Abbasiyah yang kemudian dijadikan istrinya. Khaizuran menyambangi Madinah untuk memerintahkan masyarakat setempat mengadakan perayaan maulid Nabi Muhammad yang berpusat di masjid Nabawi. Sementara untuk penduduk Mekkah, ia memerintahkan penduduknya untuk melaksanakan maulid di rumah-rumah mereka.⁴⁶ *Kedua*, peringatan maulid pertama kali dilaksanakan oleh Dinasti Fatimiyah

⁴⁵ Agus Sunyoto, *Atlas Wali Songo* (Tangerang: Pustaka Iman, 2017), 436–38.

⁴⁶ Nuruddin Ali bin Abdullah Al-Samhudi, *Al-Wafa bi Akhbar Dar al-Musthafat*, vol. 2 (Mu'assassah al-Furqan li al-Turas al-Islami, 2001), 260.

di Mesir pada masa pemerintahan Abu Tamim Maad al-Mu'iz Lidinillah, khalifah keempat Dinasti Fatimiyah (341-365 H/952-975 M). *Ketiga*, ada juga yang mengatakan bahwa perintis peringatan maulid adalah Muzhaffaruddin al-Kaukabri, ipar dari Salahuddin al-Ayyubi yang merupakan penguasa di Irbil (Irak). Perayaan maulid yang digelar oleh Muzhaffaruddin sangat megah. Seluruh rakyat dan para ulama diundang. Termasuk tamu dari manca negara. Pada puncak maulid, ia menghidangkan 5 ribu kepala kambing panggang, 10 ribu ekor ayam, 100 kuda yang disembelih, 100 ribu keju dan 30 ribu piring manisan.

Setiap tahun, Muzhaffaruddin menganggarkan dana untuk peringatan maulid Nabi sebanyak 300 ribu dinar. Para tamu mancanegara dengan berbagai latar belakang dan golongan disediakan tempat jamuan. Dana yang disiapkan untuk penjamuan tersebut sebanyak 100 ribu dinar. Pada setiap tahun, ketika peringatan maulid diselenggarakan, penguasa Irbil tersebut menyiapkan dana sebanyak 30 ribu dinar untuk para tamu dari Mekkah dan Madinah, termasuk biasa suplai air dari Hijaz, dan 200 ribu dinar untuk para tawanan muslim Furinji. Ibnu Khalikan mengatakan bahwa saat para tamu, khususnya dari mancanegara pulang, mereka menggagas peringatan atau perayaan maulid di daerahnya sendiri-sendiri, sehingga maulid menyebar ke berbagai negara dengan cepat.⁴⁷

Di Indonesia, perayaan maulid dengan kitab al-Barzanji sebagai teks bacaannya dikenalkan oleh orang-orang Persia yang notabene berpaham Syi'ah. Mereka datang ke Indonesia untuk tujuan berdagang, iras-irus menularkan kebudayaan khas mereka kepada masyarakat Indonesia. Ada juga yang menyatakan bahwa perayaan maulid di Indonesia diperkenalkan oleh Syaikh Maulana Malik Ibrahim (Sunan Gresik) asal Hadhramaut, Yaman penyebar Islam di Nusantara, khususnya pantai utara Jawa.

Tradisi peringatan maulid kemudian menyebar ke seluruh daerah di Indonesia. Di Dasun, peringatan maulid Nabi Muhammad rutin dilaksanakan setahun sekali oleh pemerintah desa sebagai bentuk penghormatan terhadap hari besar umat Islam dan pengagungan terhadap Nabi Muhammad. Acara ini berpusat di masjid NU yang oleh

⁴⁷ Hasan Al-Sadubi, *Tarikeb al-Ihtifal bi al-Maulid al-Nabawi* (Kairo: Mathba'ah al-Istiqamah, 1948), 160–70.

masyarakat disebut dengan masjid desa. Istilah masjid desa dimaksudkan untuk menghindari sekat antara NU dengan LDII.⁴⁸

Menurut keterangan dari Sujarwo (kepala desa Dasun sejak 1998-sekarang), tradisi peringatan maulid Nabi di Dasun diinisiasi oleh dirinya. Inovasi yang ia lakukan, peringatan maulid dilaksanakan dan didanai oleh desa tanpa mengatasnamakan paham atau organisasi keagamaan tertentu. Tujuannya agar semua masyarakat pada semua kalangan tanpa melihat paham keagamaan tertentu bisa hadir di acara mulia tersebut. Bahkan, ia mengatakan beberapa kali yang menjadi panitia adalah masyarakat LDII. Beberapa tokohnya pun turut hadir sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan mereka kepada Nabi Muhammad.⁴⁹

3. Santunan Anak Yatim

Satu lagi kegiatan keagamaan di Dasun yang diinisiasi oleh desa adalah santunan anak yatim. Kegiatan ini dilaksanakan setahun tiga kali, yaitu di bulan Ramadhan, 10 Muharram dan di bulan Rabi'ul Awwal.⁵⁰ Kegiatan sosial kemanusiaan ini berhujjah pada QS. Al-Ma'un yang memerintahkan para manusia agar memperhatikan para anak yatim dan saling membantu terhadap sesama. Selain itu, orang yang tidak peduli terhadap anak yatim, berarti ia adalah pendusta agama. Pemilihan anak yatim ini karena dalam doktrin Islam, anak yatim memiliki kedudukan mulia di sisi Allah dan Rasul-Nya. Tujuannya untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka agar mereka tidak terlantar.

Pelaksanaan santunan di Dasun langsung ditangani oleh Kepala Desa setempat, Sujarwo yang dilaksanakan di rumahnya sendiri (bulan Ramadhan) di balai desa Dasun dan di masjid desa. Sujarwo berharap kegiatan ini dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berbagi kepada sesama. Sujarwo secara tegas menyatakan bahwa ia tidak membedakan pemberian tali asih ini antara anak yatim dari keluarga LDII maupun dari keluarga orang NU. Komitmen ini ia sampaikan dalam rangka merawat kerukunan umat beragama sebagai syarat terwujudnya masyarakat Dasun yang bermartabat. Juga sebagai manifestasi dari tri kerukunan umat beragama

⁴⁸ Sujarwo, Wawancara Kepala Desa. Dasun.

⁴⁹ Sujarwo.

⁵⁰ Exsan Ali Setyonugroho, Wawancara Masyarakat Desa Dasun, 28 November 2023.

yang meliputi kerukunan antar umat beragama, kerukunan internal umat beragama dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan seluruh lapisan masyarakat.⁵¹

Interaksi NU dan LDII di Desa Dasun Lasem

Interaksi menjadi kebutuhan pokok setiap individu manusia, karena mereka merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Hubungan timbal balik antara keduanya biasa disebut dengan interaksi sosial.⁵² Melalui kehidupan yang berinteraksi inilah manusia dapat membangun kehidupan yang harmoni maupun dis-harmoni, baik antar individu, kelompok, maupun masyarakat.

Sifat sosial yang dimiliki manusia sejatinya mempunyai tujuan yang sama dalam menjalin hubungan kehidupan antara satu kelompok dengan yang lainnya. Sebab itu struktur masyarakat dan setiap individu adalah bagian integral yang tidak terpisahkan. Terjalannya struktur sosial dalam bermasyarakat dapat mempengaruhi aspek sosial mereka, terutama dalam melakukan tindakan dan sikap.⁵³ Dari sini maka interaksi sosial dapat menggambarkan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok.

Dalam melakukan interaksi sosial, keberadaan individu lain sangat perlu untuk diperhatikan. Sebab baik buruknya raksi yang berupa sikap atau tindakan seseorang bagian dari manifestasi dari interaksi sosial itu sendiri. Hubungan yang positif akan berdampak baik, begitu pula juga dengan hubungan negatif akan berdampak buruk bagi keduanya atau bahkan dapat menjadikan tidak adanya interaksi.⁵⁴ Dengan demikian baik buruknya sikap dan tindakan seseorang bergantung pada sejauh orang tersebut berinteraksi dengan orang lain.

Polarisasi umat Islam yang beragam menjadi bukti perkembangan sejarah Islam di Indonesia, sejak era kemerdekaan, Islam telah menampilkan keragaman bentuk, yang dimanifestasikan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam. Kemudian para

⁵¹ Sujarwo, Wawancara Kepala Desa. Dasun.

⁵² Khotimah Khotimah, "Interaksi Sosial Masyarakat Islam dan Kristen di Dusun IV Tarab Mulia Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar," *Kutubkhanah* 19, no. 2 (2016): 244, <https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v19i2.2554>; Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 55.

⁵³ Umi Hanik, *Interaksi Sosial Masyarakat Plural Agama* (Yogyakarta: CV. Penerbit Kutub, 2019), 8–10.

⁵⁴ Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, 25.

peneliti keragaman Islam ini mengklasifikasikan Islam dengan berbagai nama. Pertama, traditional Islam (Islam tradisional) yaitu, ibadahnya tetap tercampur dengan adat atau tradisi di daerah tertentu, selanjutnya yaitu, penggunaan akal dan logika untuk menghadapi problema dalam Islam dengan menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai acuan terdapat dalam modern Islam (Islam modernis). Kemudian Islam puritan (murni), Islam nasionalis, Islam abangan, Islam ekstrem dan lain sebagainya.

Dari berbagai penamaan Islam di atas, dapat menerangkan bahwa umat Islam di Indonesia mengalami pluralitas. Umat Islam di Indonesia menciptakan organisasi keagamaan berlandaskan aliran keagamaannya, seperti: Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dan lain sebagainya. Organisasi keagamaan mempunyai fungsi sebagai wadah untuk menampung kolektifitas identitas dari kelompoknya, dan juga sebagai wadah dalam melaksanakan dakwah Islamiya. Hal tersebut menjadi salah satu fenomena sosial di Indonesia, yang sering kali menimbulkan kebingungan masyarakat awam. Sehingga memunculkan pelabelan sesat pada aliran-aliran keagamaan tertentu oleh pihak tertentu.

Sebelum membahas interaksi NU dan LDII di desa Dasun, perlu melihat lebih jauh interaksi LDII dalam lingkup keindonesiaan. Sejarah mencatat bahwa LDII adalah bagian dari organisasi Islam di Indonesia yang pernah dianggap menyimpang dan juga meresahkan oleh masyarakat.⁵⁵ Anggapan ini kemudian melahirkan stereotype sesat dari pihak-pihak tertentu. Pelabelan ini kerap kali menimbulkan disharmoni dan konflik di berbagai daerah, misalnya di kecamatan Cawas kabupaten Klaten, mayoritas masyarakat menjauhi warga yang menganut paham LDII. Masyarakat menganggap bahwa ajaran LDII adalah ajaran yang dilarang karena dianggap masih sama dengan ajaran Islam jamaah atau Darul Hadits yang tertuang dalam SK Jaksa Agung RI No. Kep-08-D.A/10/1971 29 Oktober 1971.⁵⁶

Ajaran LDII yang dianggap sesat oleh masyarakat misalnya sebagai berikut; (1) tidak mau berjabat tangan dengan orang lain, (2) selain warga LDII dianggap kafir, (3) tidak mau salat di masjid selain masjid LDII, (4) tidak mau bermakmum kepada warga selain LDII (Abidin 2021). Namun anggapan ini mulai memudar setelah ada fatwa

⁵⁵ Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Aliran/Faham Keagamaan dan Sufisme Perkotaan*, ed. oleh Nuhriison M Nuh (Jakarta: Prasasti, 2009), 49.

⁵⁶ Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 73.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 03/Kep/KF-MUI/IX.2006 tahun 2006 yang menyatakan bahwa LDII sudah tidak sesat lagi dan menganut paradigma baru.⁵⁷

Sejak saat dikeluarkannya fatwa MUI tersebut LDII mulai mendapatkan tempat di ruang publik karena berada dibawah naungan MUI. Bahkan ketua NU saat itu Said Aqil Siraj dalam sambutannya di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII 2007, di Gedung Balai Kartini, Jakarta mengajak LDII bermitra dengan NU dan Muhammadiyah. Mitra ini menurutnya penting karena untuk menghilangkan ketidakpercayaan di antara ketiga organisasi tersebut. Ini artinya sejak tahun 1971 sampai 2006 LDII dianggap mengajarkan doktrin sesat.⁵⁸

Berkaitan dengan Desa Dasun kecamatan Lasem, yang menarik dan berbeda dengan paparan di atas adalah interaksi sosial yang dilakukan oleh warga Nahdlatul Ulama (NU) tergolong pada interaksi yang positif. Hal ini dapat dilihat bagaimana mereka membangun interaksi dengan warga selain NU, misalnya dengan warga LDII yang dianut oleh seluruh warga Dasun di era 1960-1980 an dan menjadi mayoritas sejak era 1990-2000 an. Bukan hanya sekedar hidup berdampingan secara tata ruang, namun mereka juga berdampingan pada seluruh kegiatan yang bersifat sosial dan bahkan keagamaan. Ini artinya warga NU Dasun telah lebih lama mengakui LDII dan sekaligus bermitra dalam lini kehidupan mereka.

Menurut penuturan mbah Salam warga NU pertama di Dasun, pada tahun 1991 yang saat itu NU Dasun masih sangat minoritas namun selalu dilibatkan dalam kegiatan yang berbentuk sosial keagamaan, misalnya pengajian kitab salaf, gotong royong, maupun pembangunan desa. Setidaknya gambaran ini menunjukkan bahwa interaksi yang dibangun dan dilakukan oleh warga NU dengan warga LDII Dasun adalah interaksi positif.⁵⁹

Khusus dalam konteks pengajian kitab salaf, mbah Salam menceritakan bahwa ketika awal mula bertempat tinggal di Dasun ia diminta langsung oleh ketua LDII Dasun saat itu. Permintaan ini bermula dari diskusi keagamaan mbah salam dengan ketua LDII Dasun dan kemudian berlanjut pada forum ngaji. Pengajian yang diampu

⁵⁷ Lihat fatwa MUI Nomor : 03/Kep/KF-MUI/IX.2006.

⁵⁸ NU Online, "Perlu Kemitraan NU, Muhammadiyah, dan LDII," nu.or.id, 2017, <https://www.nu.or.id/warta/perlu-kemitraan-nu-muhammadiyah-dan-ldii-bZwC2>.

⁵⁹ Mbah Salam, Wawancara Tokoh Agama, Dasun.

mbah Salam bahkan dilakukan di masjid LDII yang diberi nama masjid Baitur Rasyidin.⁶⁰

Cerita lain bersumber dari Jarwo, pendatang dari Grobogan dan sekarang menjabat sebagai kepala desa. Ia adalah orang NU yang menikah dengan orang LDII. Sebab pernikahan inilah istrinya yang awalnya berafiliasi LDII beralih menjadi paham NU. Sejak sebelum menjadi kepala desa Jarwo sudah mengampanyekan hidup harmoni dengan LDII. Hal tersebut ia tunjukkan dengan memberi santunan anak yatim desa Dasun tanpa membeda-bedakan paham keagamaan. Bahkan ia menuturkan bahwa santunan anak yatim tersebut lebih banyak didominasi oleh kalangan LDII.⁶¹

Menurut sumber dari masyarakat Dasun bahwa Jarwo adalah kepala desa yang berjasa besar terhadap interaksi positif yang dilakukan NU dengan LDII desa Dasun sehingga dapat hidup berdampingan sampai sekarang. Karena melalui dia harmonisasi NU dan LDII semakin terlihat dalam kultur sosial maupun kultur keagamaan masyarakat Dasun. Misalnya tradisi maulid Nabi Muhammad, Suronan, Ruwahan, dan semua hal yang terkait masyarakat dijadikan program desa olehnya. Dalam kepanitiannya melibatkan unsur NU dan LDII. Hal ini ia lakukan karena menurutnya sebagai orang NU maupun sebagai Kepala desa ia harus dapat mengayomi masyarakat, bahkan non-muslim sekalipun.⁶²

Implementasi Fungsionalisme Struktural Talcott Parson dalam upaya Menjaga dan Melestarikan Moderatisme NU di Desa Dasun

Masyarakat dalam perspektif fungsionalisme struktural dipandang sebagai sebuah sistem. Struktur sosial, berikut masing-masing elemen yang ada di dalamnya, seluruhnya terintegrasi dan memiliki fungsi yang berbeda namun saling bertalian dan menciptakan sebuah konsensus dan keteraturan sosial. Selanjutnya, seluruh elemen juga saling beradaptasi, baik terhadap perubahan internal maupun eksternal masyarakat. Adaptasi tersebut dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk menyesuaikan fungsi atau peran masing-masing individu dalam masyarakat.⁶³

⁶⁰ Mbah Salam.

⁶¹ Sujarwo, Wawancara Kepala Desa. Dasun.

⁶² Sujarwo.

⁶³ Bernardus Raho, *Teori Sosiologi Modern (Edisi Revisi)* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2021), 48.

Untuk memenuhi kebutuhan dalam sebuah sistem, Parson menyatakan bahwa secara mutlak masyarakat harus memenuhi empat (4) persyaratan supaya setiap individu di dalam masyarakat berjalan sesuai fungsi dan perannya. Empat syarat ini, dalam teori yang dikembangkan oleh Parson dikenal dengan istilah AGIL (*Adation, Goal, Integration, dan Latency*). Keempat syarat tersebut menjadi urgen dalam menjaga dan mempertahankan stabilitas masyarakat agar tetap eksis, seimbang, dan terwujud harmonisasi di antara masyarakat dengan segala latar belakang yang berbeda.

1. A (Adaption)

Maksud dari adaptasi adalah cara sistem menyesuaikan dengan dunia material dan pemenuhan kebutuhan material untuk bertahan hidup. Fungsi adaptasi terhadap lingkungan adalah mampu menjamin keberlangsungan hidup masyarakat supaya tetap eksis dan bertahan lama. Adaptasi berfungsi juga untuk menyelesaikan persoalan sistem dengan cara memobilisasi berbagai sumber dasar dalam merealisasikan tujuan.⁶⁴ Selain itu, sebuah sistem harus mampu mengatasi persoalan yang bersifat eksternal, genting, dan tentu harus mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan kebutuhannya.⁶⁵

Dalam perspektif adaptasi, keberadaan organisasi Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah dan warga NU sebagai jamaah di tengah-tengah masyarakat desa Dasun yang didominasi oleh warga LDII tidak menjadi masalah. Tentu saja, dengan melihat secara singkat sejarah NU-LDII Dasun, ada beberapa upaya dalam menjadikan kedua elemen masyarakat tersebut (baca: warga NU-LDII) tetap harmonis, dinamis, dan eksis. Di antaranya adalah upaya tokoh agama dan masyarakat yang berusaha menghilangkan sekat di antara dua elemen tersebut dengan cara, misalnya, menyatukan keduanya dalam even-even tertentu seperti memobilisasi masyarakat umum Dasun dalam acara sedekah bumi, sedekah laut, suronan, dan santunan anak yatim. Acara-acara atau tradisi-tradisi tersebut dibungkus dalam wadah yang netral, tanpa membawa embel-embel ormas atau ideologi tertentu. Namun yang ditekankan adalah bahwa acara atau tradisi tersebut benar-benar acara desa yang bisa dilaksanakan oleh siapa pun. Bentuk kepanitian dalam even-even tertentu, baik even sosial, budaya, dan keagamaan

⁶⁴ Munch, "Talcott Parsons and the Theory of Action. II. The continuity of the development," 775.

⁶⁵ Raho, *Teori Sosiologi Modern (Edisi Revisi)*, 121.

senantiasa melibatkan seluruh warga tanpa memandang organisasi atau pun kepercayaan.

Adaptasi semacam ini sudah dilakukan oleh NU. Kepala Desa Sujarwo yang sejak tahun 1998 hingga sekarang, sebagai pemangku kebijakan, telah mengajarkan sikap-sikap moderat kepada warganya dalam menjaga harmonisasi dan guyup-rukun warga-warganya. Upaya yang dilakukan, misalnya dengan kegiatan santunan anak yatim di kediamannya setiap bulan Ramadhan, kebijakan untuk menamakan masjid Desa yang secara afiliasi merujuk pada NU, dan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan juga tradisi yang disentralkan di masjid desa dan Punden Mbah Kongso merupakan bentuk adaptasi masyarakat Dasun yang mampu menjalin keakraban antara anggota keluarga, kepala keluarga, tokoh masyarakat sekitar yang tinggal, bahkan masyarakat pendatang.

2. G (Goal)

Goal merupakan pencapaian tujuan. Artinya setiap sistem harus mencapai dan menjelaskan tujuan utama. Sistem dikatakan berfungsi manakala orientasi pada sebuah tujuan sesuai dengan apa yang telah dirancang.⁶⁶ Sub sistem ini bertalian dengan hasil produk atau output dari sistem dan kepemimpinan. Politik menjadi leader dalam sistem ini. selain itu, fungsi pencapaian tujuan lainnya adalah berdimensi pemerintahan, artinya bagaimana pemerintah mampu mengorganisir macam-macam sumber yang ada.⁶⁷

Terkait dengan moderatisme NU Dasun, tradisi-tradisi, kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan yang dilakukan atas dasar kewargamasyarakatan (bukan ideologi maupun organisasi keagamaan) yang bertujuan untuk membangun solidaritas, kekompakan, kebersamaan yang dalam bahasa agama disebut sebagai al-takāful al-ijtimā'i, bentuk kesetiakawanan dan tanggung jawab bersama.

3. I (Integration)

Integration merupakan penyatuan sub sistem dengan menjaga tatanan. Dalam hal ini, sistem hukum, lembaga-lembaga, dan komunitas-komunitas merupakan bagian

⁶⁶ Prasetya, Nurdin, dan Gunawan, "Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal," 936.

⁶⁷ Sindi Aprilia dan Umi Juniarti, "Implementasi Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons Dalam Upaya Melestarikan Tradisi Islam Melayu Nganggung Dulang di Bangka Belitung," *JURNAL DLALOKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi Islam* 1, no. 01 (2022): 33.

yang memperjuangkan tatanan sosial ini.⁶⁸ Integrasi merupakan sistem yang mengatur antar hubungan bagian yang menjadi komponennya, selain juga mengelola antar hubungan ketiga fungsi lainnya. Integrasi membuat kesatuan unit dalam sistem dengan segala variannya yang saling membentuk solidaritas.⁶⁹ Fungsi Integrasi ini berkaitan dengan institusi-institusi agama dan non-agama, artinya bagaimana institusi yang ada dalam sistem sosial bisa harmoni, seimbang, dan terkoordinir dengan baik.

Integrasi dalam penelitian ini terkait dengan tokoh masyarakat atau agama yang berperan aktif dalam “memanfaatkan” situasi, baik itu kepala desa, perangkat, dan kiai atau ulama di desa Dasun. Sujarwo, sebagai kepala desa Dasun senantiasa memobilisasi warga supaya hidup guyup rukun dan kompak. Mobilisasi tersebut misalnya ditunjukkan pada kegiatan-kegiatan desa yang melibatkan seluruh warga Dasun, sebut saja kerja bakti desa, sedekah bumi, sedekah laut, yang semuanya berdasarkan intruksi kepada warga untuk dilakukan dan dikerjakan bersama-sama tanpa membedakan antara satu ormas dengan ormas lain. Bahkan dalam kepanitiaan, misalnya panitia muludan, seluruh elemen masyarakat baik NU-LDII semua dilibatkan untuk menyukseskan acara tersebut. kegiatan pengajiannya pun dilaksanakan di masjid desa Dasun.⁷⁰

4. L (Latency)

Fungsi latensi mengacu pada kebutuhan masyarakat untuk mencapai arah panduan yang jelas dan gugus tujuan dari tindakan. Lembaga-lembaga yang ada dalam sub sistem ini, seperti tempat ibadah, sekolah, keluarga, bertugas untuk memproduksi nilai-nilai budaya, menjaga solidaritas, dan sosialisasi nilai-nilai. Sasaran akhir dari sistem ini adalah terpeliharanya setiap model dan norma (latent pattern), yakni dengan memelihara dan pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang model atau norma tersebut.⁷¹

Pada poin latensi ini, upaya menjaga dan memelihara model atau norma terbilah tidak mudah. Para tokoh masyarakat maupun tokoh agama dalam menjaga moderatisme, harmoni, solidaritas masyarakat memiliki beberapa cara untuk menarik minat masyarakat, baik tingkat anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Salah satu cara

⁶⁸ Aprilia dan Juniarti, 33.

⁶⁹ Munch, “Talcott Parsons and the Theory of Action. II. The continuity of the development,” 771.

⁷⁰ Sujarwo, Wawancara Kepala Desa. Dasun.

⁷¹ Prasetya, Nurdin, dan Gunawan, “Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal,” 936.

adalah mengadakan festival Budaya. Di dalam festival tersebut terdapat beberapa agenda, misalnya pameran miniatur budaya Dasun, susur sungai, pertunjukan seni Laesan, sarasehan Budaya, kemah budaya, menangkap ikan bandeng, lomba memasak olahan tradisional, dan makan gedon, makan bersama.

Seluruh kegiatan tersebut, walapaun tidak semua, namun mayoritas senantiasa diselenggarakan dan dilakukan untuk menjaga kebudayaan desa Dasun dan menjaga kebersamaan, harmoni, kekompakan, dan solidaritas warga Dasun. Semua elemen, baik NU-LDII, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, mengikuti acara tersebut tanpa melihat unsur ideologi apalagi organisasi keagamaan yang ada di desa Dasun.

KESIMPULAN

Moderatisme Nahdlatul Ulama desa Dasun setidaknya menghasilkan harmonisasi baik dari segi sosial keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat bagaimana interaksi positif terbangun antar warga Dasun, terutama warga NU dan LDII. Bukan hanya sekedar hidup berdampingan secara tata ruang, namun mereka juga berdampingan pada seluruh kegiatan yang bersifat sosial dan bahkan keagamaan. Harmonisasi yang terbentuk antara masyarakat NU dan LDII dipertegas dengan analisis fungsi AGIL dalam teori fungsionalisme struktural Talcott Parson yang menggambarkan sikap moderatisme Nahdlatul Ulama di desa Dasun. *Adaption* tergambar dengan adanya upaya tokoh agama atau masyarakat yang menghilangkan sekat antara kedua belah pihak dengan menyatukan keduanya ke dalam even yang bercorak sosial keagamaan tanpa terbungkus embel-embel ideologi atau ormas tertentu. Kegiatan atau even sosial keagamaan itu bertujuan (*Goal*) supaya terbangun di antara keduanya sikap solidaritas, kekompakan, kebersamaan, kesetiakawanan, dan tanggungjawab bersama. Peran tokoh agama maupun masyarakat mendapatkan porsi penting ketika masyarakat Dasun dipersatukan (*integration*) dalam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan bahkan pemerataan saat membentusk susunan kepanitiaan. Pada akhirnya, untuk menjaga harmonisasi dan solidaritas masyarakat Dasun diperlukan upaya yang tegas dari para tokoh desa setempat (*latency*). Festival budaya adalah salah satu media untuk menjaga dan memelihara keharmonisan kedua belah pihak.

REFERENSI

- Akhmadi, A. "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia'S Diversity." *Inovasi: Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 45–55.
- Al-Sadubi, Hasan. *Tarikh al-Ihtifal bi al-Maulid al-Nabawi*. Kairo: Mathba'ah al-Istiqamah, 1948.
- Al-Samhudi, Nuruddin Ali bin Abdullah. *Al-Wafa bi Akhbar Dar al-Musthafat*. Vol. 2. Mu'assassah al-Furqan li al-Turas al-Islami, 2001.
- Aprilia, Sindi, dan Umi Juniarti. "Implementasi Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons Dalam Upaya Melestarikan Tradisi Islam Melayu Nggangung Dulang di Bangka Belitung." *JURNAL DIALOKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi Islam* 1, no. 01 (2022): 18–37.
- Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan. *Aliran/Faham Keagamaan dan Sufisme Perkotaan*. Disunting oleh Nuhrison M Nuh. Jakarta: Prasasti, 2009.
- Dodi, Limas. "Metamorfosis Gerakan Sosial Keagamaan: Antara Polemik, Desiminasi, Ortodoksi, dan Penerimaan terhadap Ideologi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 1 (18 Mei 2017): 227–46. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i1.880>.
- Erwanti, Marlinda Oktavia. "Jokowi Pilih 'Menag TNI' untuk Urus Radikalisme dan Intoleransi," 2021. <https://news.detik.com/berita/d-4758697/jokowi-pilih-menag-tni-untuk-urus-radikalisme-dan-intoleransi>.
- Fuad, A Jauhar. "Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 31, no. 1 (2020): 153–68. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.991>.
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1983.
- Hadiz, Vedi R. *Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2019.
- Hamdani, Hamdani. "Defending Islam Nusantara at the Frontline." *ISLAM NUSANTARA: Journal for the Study of Islamic History and Culture* 2, no. 1 (2021): 21–40. <https://doi.org/10.47776/islamnusantara.v2i1.103>.
- Hamdi, Ahmad Zainul. "Radicalizing Indonesian Moderate Islam From Within: The Nu-fpi Relationship in Bangkalan, Madura." *Journal of Indonesian Islam* 7, no. 1 (2013): 71–95. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.1.71-95>.
- Handayani, Lusi. "Peran KH. Ma'shum Ahmad dalam mendirikan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang (1926-1972)." Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Hanik, Umi. *Interaksi Sosial Masyarakat Plural Agama*. Yogyakarta: CV. Penerbit Kutub, 2019.
- Haris, Munawir. "Islam Moderat Konteks Indonesia Dalam Perspektif History." *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 7, no. 2 (2015): 257–72.
- Hilmy, Masdar. "The Configuration of Radical Islamism in Indonesia: Some Contemporary Assessments and Trajectories." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 14, no. 1 (1 Mei 2014): 1–21. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v14i1.84>.

- Indonesia CNN. "PR Besar Menag Yaqut Cholil Benahi Kerukunan Beragama di RI," 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201223063156-32-585459/pr-besar-menag-yaqut-cholil-benahi-kerukunan-beragama-di-ri>.
- Iwan. Wawancara Mantan Anggota LDII, Dasun, 7 November 2023.
- Jaiz, Hartono Ahmad. *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Khotimah, Khotimah. "Interaksi Sosial Masyarakat Islam dan Kristen di Dusun IV Tarab Mulia Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar." *Kutubkhanah* 19, no. 2 (2016): 239–49. <https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v19i2.2554>.
- KOMINFO, PDSI. "Dorong Penguatan Moderasi Beragama Di Tengah Kehidupan Masyarakat." Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2021. <http://content/detail/33719/dorong-penguatan-moderasi-beragama-di-tengah-kehidupan-masyarakat/0/berita>.
- Mas'ud, Abdurrachman. *Intelektual Pesantren: Perbelatan Agama dan Tradisi*. Yogyakarta: LKIS, 2004.
- Mbah Salam. Wawancara Tokoh Agama, Dasun, 7 November 2023.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhtarom, Ali. "Moderasi Beragama dalam Pribumisasi Pendidikan Islam." Dalam *Menanam Kembali Moderasi Beragama Untuk Merajut Kebhinekaan Bangsa*. Jakarta: Teras Karsa, 2021.
- Munch, Richard. "Talcott Parsons and the Theory of Action. II. The continuity of the development." *American Journal of Sociology* 87, no. 4 (1982): 771–826.
- NU Online. "Perlu Kemitraan NU, Muhammadiyah, dan LDII." [nu.or.id](https://www.nu.or.id/warta/perlu-kemitraan-nu-muhammadiyah-dan-ldii-bZwC2), 2017. <https://www.nu.or.id/warta/perlu-kemitraan-nu-muhammadiyah-dan-ldii-bZwC2>.
- PBNU. *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 NU cet II*. Jakarta: Lembaga Ta'lif wa an-Nasyr, 2016.
- Prajarto, Nunung. "Perbandingan Sistem serta Hubungan antara Sistem Komunikasi, Sistem Sosial, dan Sistem Politik." *Modul 2: Pendekatan dalam Perbandingan Sistem Komunikasi 2.1*, 2014.
- Prasetya, Andina, Muhammad Fadhil Nurdin, dan Wahyu Gunawan. "Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal." *SOSIETAS* 11, no. 1 (2021): 929–39. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v11i1.36088>.
- Pujiyono. Wawancara Tokoh Agama, Dasun, 7 November 2023.
- Qasim, Muhammad. *Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan*. Makassar: Alauddin University Press, 2020.
- Raho, Bernardus. *Teori Sosiologi Modern (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2021.
- Redaksi. "Enam Desa Sepakati Nama 'Alas Samudra Wela.'" *Pemerintah Kabupaten Rembang* (blog), 25 November 2015. <https://rembangkab.go.id/uncategorized/enam-desa-sepakati-nama-alas-samudra-wela/>.
- RI, Kementerian Agama. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Saenong, Faried F. "Nahdlatul Ulama (NU): A Grassroots Movement Advocating Moderate Islam." Dalam *Handbook of Islamic Sects and Movements*, 129–50. Brill, 2021. https://doi.org/10.1163/9789004435544_009.
- Salik, Mohammad. *Nahdlatul Ulama dan Gagasan Moderasi Islam*. Malang: Edulitera, 2020.

- Setyonugroho, Exsan Ali. *DASUN: Jejak Langkah dan Visi Kemajuannya*. Yogyakarta: Lintas Nalar, 2021.
- . Wawancara Masyarakat Desa Dasun, 28 November 2023.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif*. 5 ed. Bandung: Mizan, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sujarwo. Wawancara Kepala Desa. Dasun, 12 Desember 2023.
- Sunyoto, Agus. *Atlas Wali Songo*. Tangerang: Pustaka Iman, 2017.
- Susanti, Emy. “Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar.” Dalam *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Wahab, Abdul Jamil. *Harmoni di Negeri Seribu Agama*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- Wardah, Fathiyah. “Survei LSI: Gerakan 212 Picu Naiknya Intoleransi di Indonesia.” VOA Indonesia, 2021. <https://www.voaindonesia.com/a/survei-lsi-gerakan-212-picu-naiknya-intoleransi-di-indonesia/4585895.html>.
- Zainuddin. *Proyeksi Moderasi Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).